JURNAL SIDANG MPR RI

MUKADIMAH

Pilihan Ketua MPR

Pemilihan ketua MPR kali ini berlangsung alot. Lobi-lobi politik dan berbagai interupsi muncul dalam tiap kesempatan. Tidak mulusnya pemilihan kali ini bisa jadi karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan semua anggota MPR maju menjadi ketua. Tentu saja hal ini menjadikan pemilihan ketua MPR lebih menarik. Peta politik berubah, komposisi juga berubah.

Konfigurasi politik yang terjadi di MPR memang tidak lepas dari putusan MK itu. Munculah beberapa konsensus politik yang dilakukan oleh DPD dan partai politik. Beberapa nama muncul baik di media massa maupun dalam lobi-lobi politik seperti Taufik Kiemas yang didukung oleh beberapa partai, Hidayat Nur Wahid yang didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan juga muncul beberapa tokoh lain seperti Ginanjar Kartasmita dari DPD.

Namun yang paling menarik perhatian adalah bagaimana komposisi pimpinan MPR. Ada yang menginginkan 3 dari DPR dari 2 dari DPD. Selain itu banyak juga yang menginginkan 4 DPR dan 1 DPD.

Ada sebelas poin yang disampaikan oleh ketua MPR sementara Marzuki Alie bersama dengan Irman Gusman. Selain itu diputuskan juga nama fraksi yang terdiri dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat.

Dalam beberapa pidatonya, masing-masing juru bicara partai mengungkapkan keinginannya. Semua Fraksi maupun DPD sepakat untuk saling membangun kebersamaan dan saling menguatkan demi kemajuan MPR mendatang.

Namun pada sidang paripurna ketiga yang berlangsung Sabtu malam, Taufik Kiemas akhirnya terpilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara aklamasi. Sementara wakil-wakil ketua adalah Melani Leimena Suharli (PD), Hajriyanto Y Tohari (Golkar), Lukman Saefudin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (DPD).

Sidang menyepakati komposisi pimpinan yang disetujui tetap pada kesepakatan semula yakni 4 DPR banding 1 DPD. Dari delapan delapan fraksi yang ada, sebanyak tujuh fraksi memberikan suara. Fraksi PKS yang tidak memberikan paket pimpinan MPR yang diajukannya. Berdasarkan Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2009, apabila hanya ada satu paket calon pimpinan maka langsung diputuskan sebagai pimpinan MPR.(Huda)

JURNAL SIDANG MPR-RI

	Hal.
EDITORIAL	
- Pemimpin Baru MPR	3.
LAPORAN UTAMA	
- H. Taufik Kiemas Ketua MPR.....	4.
- Ihwal 25 Anggota DPD	5.
- DPD Tak Hadiri Sidang MPR.....	6.
LIPUTAN	
- Ganjar Pranowo: "Taufik Kiemas telah Disiapkan Sejak Lama.....	7.
- Hajriyanto Y. Thohari Golkar Tidak Punya Target Jadi Ketua....	8.
- Lukman Edy: F-PKB Tetap Usung Paket Yang Sama.....	8.
- Lukman Hakim Saifuddin MPR Harus Siap Jika Terjadi Amandemen.....	9.
- Rapat Paripurna II MPR RI Menetapkan Pimpinan Fraksi.....	9.
- Ahmad Farhan Hamid " Yang Diputuskan MK Lebih Dari yang Diminta.....	10.
SERBA SERBI	
- Paranormal Kondang Masuk Senayan.....	11.
- Salam Baru Dari Partai Baru.....	11.
- Anak Betawi Jadi Anggota MPR.....	12.
- Awal yang Berat Bagi Jamal Mirdad.....	12.
- Lupa Ketok Palu.....	13.
- Isteri jadi Jubir, Suami Interupsi.....	13.
TOKOH HARI INI	
- Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati.....	14.

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI, **PENANGGUNG JAWAB** DR. C. Rahimullah, SH., M.Si, **PEMIMPIN UMUM** Drs. Eddie Siregar, M.Si **PEMIMPIN REDAKSI** M. Rizal, **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Yana Indrawan **REDAKTUR PELAKSANA** Elis Murniaty, Suratno **KOORDINATOR REPORTASE** Rharas Esthining Palupi, Adriansyah, **REDAKTUR FOTO** Slamet Eko Suprayitno, Supriyanto **REPORTER** Euis Karmilah, Budi Muliawan, Rosando, Sopiah, Tengku Novan Muda Mulya, Tri Hastuti, Rudi M. Gultom, Jaka Sindu, Anggi Widia P, Suwarni, Bayu Setiadi, Suci Ati, Muammil Rokhily, Sugeng Irianto, Nita Juwita, Dian Arivani **FOTOGRAFER** Ari Soeprapto, Sugeng, Teddy Agusman, Wira, Eka Hindra Sasmita, Supardy, Iwan, Agung Sulistiono **PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI** Syamsul Bahri **KOORDINATOR DISTRIBUSI** Elly Triani **STAF DISTRIBUSI** Hadi Anwar Sani, Jajuni, Kusnani **SEKRETARIS REDAKSI** Ati Oktafia, Tri Sulistianingsih, Fatmawati, Yenita Revi **TIM AHLI** Syahril Chili, Johni Yasrul, M. Husen, Rini S. Danudjaja, Ardi Winangun, Suroso P. Adrianto, Iman Firdaus, Derry Irawan, Mustafa Helmy, Budi Sucahyono, Nurul Huda, Mauludi Rachman, Rianzi Gautama. **ALAMAT REDAKSI** Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, JakartaTelp. (021) 57895050, 57895051, 57895237, 57895238 Fax. (021) 57895051, 57895237

Pemimpin Baru MPR

Pesta pora yang menelan biaya Rp 46 milyar itu sudah selesai Sabtu malam (3/10) dan pelantikan pimpinan MPR dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para peserta pesta yang menginap di Hotel Borobudur dan JW Marriot hari ini juga sudah mulai berangsur meninggalkan hotel bintang lima itu. Para pemimpin yang telah terpilih hari ini sudah mulai bekerja untuk yang membiayai pesta itu, rakyat. Para pemimpin sudah harus mulai mendengar penderitaan rakyat, terutama mereka yang tertimpa bencana di Sumtera Barat dan Jambi.

Tapi, putusan malam tadi sedikit dipaksakan karena tidak dihadiri keseluruhan anggota DPD yang 132 orang. Hanya 25 orang anggota DPD yang hadir. Meski demikian, jalan sidang paripurna tetap berjalan dan secara aklamasi sidang memilih paket 4:1. Dengan demikian, Taufik Kiemas terpilih sebagai ketua MPR masabakti 2009-2014. ia didampingi wakil ketua Hajriyanto Y. Thohari (Golkar), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), Meilani Leimena Suharli (Partai Demokrat), dan Achmad Farhan Hamid mewakili unsur DPD.

Sidang berjalan mulus karena tak ada paket calon lain. Sidang memang harus berakhir tadi malam dan tdi malam pula harus tercetak pemimpin baru MPR untuk dilantik dengan disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Memang, dalam UU nomor 27 tahun 2009 tak dijelaskan keharusan kehadiran seluruh unsur DPD. Hanya, pada ayat 4 dan 5 Pasal 14 UU tersebut menyatakan, ketua dari unsur DPD ditetapkan dalam sidang paripurna DPD. Adakah Achmad Farhan Hamid diputuskan sidang paripurna DPD?

Krusial ini berawal dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi pasal 14 UU nomor 27 tahun 2009, yang intinya ketua MPR tidak dibatasi hanya untuk DPR saja. Putusan ini memberi peluang DPD untuk jabatan ketua MPR, meski dengan kemustahilan. DPR seolah 'tersinggung' dan seolah melampiaskan amarahnya dengan mengurangi jatah kursi pimpinan MPR. Sebaliknya, DPD seolah dapat angin untuk mencalonkan kadernya sebagai ketua MPR.

Menurut Wakil ketua La Ode Ida, DPD tidak memboikot sidang paripurna MPR. DPD hanya menunda menghadiri sidang karena masih harus membicarakan wakil DPR melalui sidang DPD. Mereka menghendaki 3:2. Mereka menolak alasan DPR mengajukan komposisi 4:1 dengan dasar jumlah kursi DPD yang hanya 132. Jauh dibanding dengan DPR yang mencapai 560. Dari hitungan itu, maka jatah DPD memang layak satu.

Tapi, bagi DPD, jumlah 132 anggota itu dipilih dari jumlah pemilih yang sama untuk DPR. Artinya, 132 orang itu sama dengan 560 orang. Kursi DPD jauh lebih mahal. Bandingkan, perolehan Ginandjar Kartasasmita untuk DPD, misalnya. Ia memperoleh 3 juta suara di Jawa Barat. Dan tercatat pula ada empat orang di DPD yang memperoleh di atas 1 juta suara.

DPD yang jumlahnya kecil memang tak bisa berbuat apa-apa. Lima tahun lalu, posisi kursi pimpinan MPR yang empat orang, DPD memperoleh jatah dua wakil ketua, yakni 2;2. Ironisnya, pada saat kursi pimpinan MPR ditambah menjadi lima, justru kursi DPD berkurang menjadi satu orang. Dan itu terjadi setelah putusan MK yang diajukan lima orang anggota DPD.

Tapi, bagaimanapun, pesta telah usai. Pesta tiga hari telah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Para penghulu Senayan telah bertambah, setelah DPR menentukan ketuanya: Marzuki Ali (PD), Priyo Budi Santoso (Golkar), Pramono Anung (PDIP), Marwoto Mitrohadjono (PAN) dan Anis Matta (PKS). Sementara DPD telah memilih mulus ketuanya Iman Gusman (Sumbar), didampingi wakil ketua La Ode Ida (Sultra) dan GKR Hemas (DI Jogjakarta).

Apa pun yang terjadi, terjadilah. Mari semua menatap ke depan untuk bangsa. Lupakan sakit hati dan jadikan semua menjadi cermin untuk introspeksi dan kesadaran bahwa jabatan adalah amanah. Jika kita melaksanakan dengan baik maka menjadi ibadah dan jika jika melaksanakan dengan buruk maka akan menjadi khianat.(MH)

H. Taufik Kiemas Ketua MPR Baru

Jurnal MPR [4/10].H.M. Taufik Kiemas akhirnya terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2009-2014 secara aklamasi. Pada sidang paripurna yang berlangung di Gedung Nusantara Sabtu (3/10) kemarin tidak dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Usai terpilih TK panggilan akrab Taufik Kiemas mendapat ucapan selamat dan pelukan dari rekan-rekannya sesama wakil rakyat, termasuk mantan ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

Walaupun sempat molor selama satu setengah jam dari jadwal yang telah ditentukan, proses pemilihan berjalan lancar. Anggota fraksi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini terpilih menjadi ketua dengan bersama 4 Wakil Ketua yaitu Hajriyanto Yasin Tohari (Golkar), Melani Leimeina Suharli (Demokrat), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), Ahmad Farhan Hamid (DPD asal Aceh).

Dalam pemilihan kali ini telah disepakati hanya satu paket karena tidak ada usulan paket lainnya. Sebelumnya, sidang menyepakati komposisi pimpinan yang disetujui tetap pada kesepakatan semula yakni 4 DPR banding 1 DPD. Dari delapan delapan fraksi yang ada, sebanyak tujuh fraksi memberikan suara yang sama sesuai dengan paket pimpinan MPR yang terpilih. Hanya Fraksi PKS yang tidak memberikan paket pimpinan MPR yang diajukannya.

Ketidakhadiran seluruh anggota DPD ternyata tidak mempengaruhi jalannya rapat Paripurna MPR untuk memilih pimpinan MPR. DPD memutuskan menunda menghadiri rapat Paripurna MPR yang mengagendakan pemilihan pimpinan MPR. DPD ngotot meminta komposisi 3-2 (2 pimpinan MPR dari DPD) sementara DPR sepakat komposisi pimpinan MPR 4-1 (4 dari DPR dan 1 dari DPD).

Dikatakan Pimpinan MPR sementara Marzuki Alie dalam putusannya, berdasarkan Keputusan MPR Nomor 3 Tahun 2009, apabila hanya ada satu paket calon pimpinan maka langsung diputuskan sebagai pimpinan MPR. Putusan tersebut langsung disambut tepuk tangan para anggota. Selanjutnya Pimpinan MPR terpilih dilantik dan diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung. Dalam acara tersebut hadir pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

I Love You Full

Persidangan kali ini memang molor lebih dari satu jam. Wakil Ketua MPR sementara, Irman Gusman tidak nampak dalam persidangan. Keterlambatan ini disebabkan menunggu beberapa anggota DPD yang belum datang. Tercatat hanya 25 anggota DPD yang datang. Sidang dibuka dengan pembacaan tatib hasil kesepakatan dari sidang paripurna kedua. Setelah itu dibacakan hasil dari keputusan masing-masing partai keputusan semua partai sama.

Keputusan paket untuk ketua MPR dibacakan oleh sekjen MPR. Namun hanya dua fraksi yang membacakan keputusannya sendiri yaitu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang dibacakan secara langsung. Fraksi PKS tidak menyatakan satu paket. Namun PKB yang agak terlambat, justru memilih paket yang telah disepakati sebelumnya. Dalam orasinya, jubir PKB malah mengutip slogan almarhum Mbah Surip, 'I Love You Full'.(Nurul Huda)

Baru Sidang Ini Dihadiri Presiden SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri acara pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR periode 209-2014 pada rapat paripurna ke-3 MPR-RI di Ruang Sidang Nusantara, Gedung MPR/DPRI, Jakarta, Sabtu malam (3/1). Pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR berlangsung khidmat.

Kehadiran Presiden SBY dalam acara pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR ini cukup istimewa karena pada dua acara sebelumnya yaitu pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD periode 2009-2014, dan pengucapan sumpah/janji anggota MPR RI 2009-2014, Presiden berhalangan hadir dan diwakili Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla.

Agenda pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemilihan pimpinan MPR periode 2009-2014. Pimpinan MPR akhirnya dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh anggota. Pimpinan MPR periode 2009-2014 adalah Ketua MPR Taufik Kiemas (PDI Perjuangan), dan Wakil Ketua masing-masing Hj. Melanie Leimena Suharli (Partai Demokrat), Drs. Hajriyanto Y. Thohari (Partai Golkar), Lukman Hakim Saefudin (PPP), dan Dr. Ahmad Farhan Hamid.

Sekitar pukul 22.30 WIB, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Bambang Yudhoyono didampingi pimpinan sementara MPR, Marzuki Alie, memasuki ruang sidang paripurna. Tepuk tangan anggota MPR mengiringi langkah Presiden memasuki ruang sidang paripurna. Sidang diikuti sebanyak 547 anggota MPR dan dihadiri beberapa menteri kabinet Indonesia Bersatu. Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR ini.

Kemudian diperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin ketua sementara MPR Marzuki Alie. Lalu, Ketua Sementara MPR RI membuka sidang yang sebelumnya sempat diskors. Marzuki mempersilakan Sekjen MPR RI membacakan putusan MPR tentang Pimpinan MPR Periode 2009-2014.

Memasuki acara pokok, Pimpinan MPR 2009-2014 mengucap sumpah/janji dipandu Ketua MA, Harifin Tumpa. Serta melakukan penandatangan berita acara pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR. Dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dan memori jabatan dari pimpinan sementara MPR kepada Pimpinan MPR 2009-2014 diteruskan dengan penandatangan berita acara.

Pimpinan baru MPR RI memulai sidang. Dalam sambutannya, Ketua MPR RI Taufik Kiemas mengatakan bahwa proses pemilihan pimpinan MPR telah memberi pelajaran kehidupan

demokrasi di Indonesia. "Kami memberi penghargaan, karena telah memberi pendidikan politik," katanya.

Menurut Taufik, MPR harus menjadi panutan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Ia juga berharap agar MPR ke depan lebih mengedepankan akuntabilitas dalam bertindak. "Semoga MPR ke depan lebih mengedepankan akuntabilitas dalam bertindak," katanya. Dalam kesempatan itu, Taufiq juga berterima kasih, berbangga dan berbunga-bunga dengan kehadiran Presiden SBY.

Acara pengucapan sumpah/janji pimpinan MPR 209-2014 diakhiri dengan pembacaan doa oleh Hasrul Azwar. Sebelum meninggalkan tempat, Presiden SBY memberi ucapan selamat kepada Pimpinan MPR 2009-2014.(Budi Sucahyo)

Ihwal 25 Anggota DPD

Pemilihan pimpinan MPR Periode 2009-2014, hanya dihadiri oleh 25 anggota DPD dari 132 anggota. Ketidakhadiran itu disampaikan oleh pimpinan sementara MPR Marzuki Alie. Marzuki semestinya didampingi oleh Irman Guzman (Ketua DPD). Namun menurut Marzuki, seluruh anggota DPD telah sepakat menunjuk Farhan Hamid (anggota DPD asal Aceh) sebagai wakil ketua MPR.

Banyaknya anggota DPD yang tidak hadir menyebabkan pemilihan tertunda selama kurang lebih satu jam. Interupsi pun bermunculan menanyakan kapan acara pemilihan akan dilakukan. Farhan Hamid yang terpilih menjadi wakil ketua MPR mendampingi Taufik Kiemas, enggan berkomentar lebih banyak soal ketidakhadiran rekan-rekannya. "Saya tidak tahu perkembangannya, sebab saya ikut dalam sidang pemilihan ketua MPR," kata Farhan.

Seperti sudah diduga sebelumnya, maka pemilihan ketua MPR pun berlangsung secara aklamasi setelah mendengarkan pandangan seluruh fraksi yang ada di MPR. Hanya Fraksi FKS yang tidak mencalonkan pimpinan. Menurut Mustafa Kamal, dari PKS, dalam ketentuan disebutkan setiap fraksi boleh mencalonkan atau tidak. "Dan kita menghargai perbedaan ini," ujarnya setelah sidang. (Iman Firdaus)

Pimpinan MPR Mendatang Harus Lebih Baik

Terpilih sudah pimpinan MPR RI Periode 2009-2014, lima pimpinan MPR baru dengan komposisi Taufik Kiemas dari PDIP sebagai ketua, dan empat wakil yang terdiri dari Hajrianto Tohari dari Partai Golkar, Melani Lemeina Suharli dari Partai Demokrat, Lukman Hakim Saefuddin dari PPP), Ahmad Farhan Hamid dari anggota DPD asal Aceh. Dengan formasi seperti itu maka komposisi yang terjadi adalah 4:1, empat dari anggota DPR dan satu dari anggota DPD.

Pemilihan pimpinan MPR periode ini bisa dikatakan sangat istimewa, sebab terpilih secara aklamasi. Seluruh fraksi mendukung paket itu kecuali F-PKS yang menyatakan abstain. Dalam pidato setelah dirinya dan keempat wakil ketua dilantik, Taufik Kiemas akan melanjutkan program kerja seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Lalu bagaimana pendapat pimpinan MPR periode sebelumnya terhadap Taufik Kiemas dan keempat wakilnya itu? Hidayat Nur Wahid Ketua MPR Periode 2004-2009, mengatakan, "Ya Pak Taufik harus melanjutkan sosialisasi UUD NRI dan Tap MPR, menghadirkan Hari Konstitusi dengan lebih bermakna lagi, menghadirkan MPR yang kemarin mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengecualian, mengelola dan melaporkan keuangannya karena itu yang penting sebab MPR mengeluarkan Tap MPR anti KKN, sehingga MPR menjadi tauladan dalam mengelola keuangan yang bersih," ujarnya. Apakah Pak Taufik mampu? "Tentunya beliau lebih mampu, harus lebih mampu dong," katanya.

Sementara menurut Wakil Ketua MPR Periode 2004-2009 A. M. Fatwa, terpilihnya Taufik Kiemas merupakan sebuah keputusan politik yang harus dihormati, apalagi paket itu terpilih secara aklamasi. "Ini sebagai sebuah keputusan yang sempurna dibanding dengan voting," paparnya. A. M Fatwa melihat ke empat wakil ketua MPR adalah tokoh-tokoh politik yang handal. Terhadap sosok Taufik Kiemas pun, A. M. Fatwa memuji, "Saya kenal secara pribadi termasuk Pak Taufik. Saya kira dia seorang politisi yang ulung," ujarnya. Dikatakan tugas pimpinan MPR adalah tugas kolektif, yang penting Taufik Kiemas bisa memimpin dengan baik tugas-tugas kemajelisan.(Ardi Winangun)

Komentar Hajriyanto Y. Thohari

"Ya tentu sangat surprise karena selama ini saya tak mempunyai aspirasi untuk menjadi pimpinan baik di DPR maupun di MPR bahkan saya pernah menjadi wakil ketua komisi 1 hanya bertahan beberapa minggu untuk kemudian mengundurkan diri oleh karena saya lebih merasa enjoy dan menikmati menjadi anggota biasa tetapi untuk kali ini saya menangkap sesuatu peluang dan saya secara tidak terlalu mempunyai target saya malah justru kemudian terpilih menjadi wakil ketua MPR RI. Ini surprise bagi saya. Ya saya paham ada yang kecewa karena ada aspirasinya itu tidak semuanya tertampung sehingga kekecewaan itu bisa dipahamilah dan kami berharap kawan-kawan di DPD memahami hal ini dan kita dapat bekerja sama dengan baik."(Dery Irawan)

DPD ke PTUN

"DPD melakukan *Press Confrence* tetang pelantikan ketua MPR RI, intinya DPD akan mem PTUN kan MPR, apa yang selama ini dikatakan cacat atau tidak kita kaji dulu sementara. La Ode menyatakan, yang pasti DPD akan melakukan kajian hukum tentang ketatanegaraan mengenai pelantikan pada proses pimpinan MPR termasuk pelantikannya, hal ini kami lakukan untuk menjaga martabat konstitusi. Dan, DPD ini sebetulnya menjaga martabat lembaga negara, menjaga martabat daerah kami berharap dan sudah disepakati tidak boleh melakukan pelanggaraan berat soal tata tertib. Intinya kami akan melakukan kajian hukum, tunggu saja." (Dery Irawan)

DPD Tak Hadiri Sidang Pemilihan Pimpinan MPR

Jurnal MPR [04/10]. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memilih tak menghadiri Sidang Paripurna III MPR dengan agenda Pemilihan Pimpinan MPR 2009-2014 di Gedung Nusantara, MPR/DPR, Jakarta, Sabtu (3/10) malam. Sidang Paripurna sempat tertunda selama 2 jam. Meski akhirnya dilanjutkan dengan hanya dipimpin oleh satu Ketua MPR Sementara, yaitu Ketua DPR Marzuki Alie pada pukul 21.00 WIB.

Alasan DPD tak menghadiri sidang karena belum tercapai kesepakatan yang menunjukkan kebersamaan dalam konteks ke-Indonesiaan sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945.

"DPD ingin tetap konsisten pada kesepakatan yang dibangun sejak awal, yakni porsi di pimpinan MPR adalah 3:2, yaitu 3 dari DPR dan 2 dari DPD. Dan teman-teman di DPD sudah menganggapnya sebagai harga mati," kata Wakil Ketua DPD La Ode Ida sesaat sebelum rapat konsolidasi internal pimpinan DPD di Gedung Nusantara V, MPR/DPR, Jakarta, Sabtu (3/10) malam.

Berdasarkan lobi-lobi internal antarfraksi dan kelompok DPD, muncul kecenderungan komposisi paket Pimpinan MPR 4:1 (4 dari DPR dan 1 dari DPD). "Itu sungguh tidak diharapkan oleh DPD," tegas La Ode. Ia mencontohkan, komposisi pimpinan MPR periode lalu saja, dengan jumlah 4 orang terdiri dari 2 anggota DPD dan 2 anggota DPR. Sekarang ini dengan 5 orang pimpinan MPR tapi justru DPR akan mengambil 4 dan DPD hanya akan diberi porsi 1.

"Saya kira semua pihak akan memahami bahwa wajah MPR adalah simbolisasi atau representasi perpaduan kelembagaan antara DPR dan DPD," jelas Laode.

Karenanya, DPD memilih melakukan rapat konsolidasi internal untuk melanjutkan negosiasi sampai pada tingkat tertentu mencapai kesepakatan. "Sikap ini diambil untuk menunjukkan bahwa kita ingin tetep menunjukkan suasana kebersamaan antara DPR dan DPD yang terpotret dalam kepemimpinan MPR," kata La Ode.

Meskipun porsi DPD kuantitasnya kecil atau kurang dari 1/3 jumlah anggota MPR, tetapi lanjut La Ode, pemilih anggota DPD yang jumlahnya 132 orang sama dengan pemilih DPR yang jumlahnya 560. "Jadi nilai keterwakilannya setara. Hanya kuantitas atau jumlah orang-orang yang ada di dalamnya jauh lebih kecil ketimbang DPR,"ungkapnya. (Rini S. Dandjaja)

Rapat Paripurna II MPR RI Sepakati Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR

Jurnal MPR [04/10]. Rapat Paripurna II MPR RI yang dipimpin Pimpinan Sementara MPR Marzuki Alie didampingi Irman Gusman telah menetapkan tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR. Penetapan tersebut berlangsung dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Sabtu (3/10) kemarin.

"Komposisi pimpinan MPR adalah satu ketua dan empat wakil ketua, dalam satu paket yang mencerminkan unsur DPR dan DPD," kata Marzuki Alie. Kemudian, Pimpinan Sementara MPR Marzuki Alie membacakan 10 poin dalam Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR. Di antaranya: pertama, pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Kedua, pimpinan MPR diusulkan dalam satu paket oleh fraksi atau kelompok anggota DPD. Ketiga, paket pimpinan MPR terdiri dari satu orang ketua dan empat wakil ketua serta mencerminkan unsur DPR dan DPD. Keempat, paket pimpinan MPR itu disampaikan dalam sidang paripurna MPR ketiga untuk ditetapkan sebagai calon pimpinan MPR.

Kelima, bila dalam pengusulan hanya ada satu paket, maka pimpinan sidang bisa langsung menetapkan paket tersebut sebagai pimpinan MPR. Keenam, bila ada lebih dari satu paket, maka akan diupayakan musyawarah. Bila tidak tercapai mufakat dalam musyawarah, maka penetapan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Ketujuh, dalam pemungutan suara, anggota memilih salah satu paket calon pimpinan MPR. Kedelapan, paket pimpinan MPR yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR. Kesembilan, apabila terjadi perolehan suara yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang. Kesepuluh, pimpinan MPR terpilih disahkan dengan keputusan majelis.

Ketika Marzuki Alie meminta persetujuan anggota MPR atas rancangan Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR, ada interupsi dari Wahidin Ismail (kelompok DPD) yang menginginkan ada dua wakil dari DPD dalam komposisi pimpinan MPR. "Dalam rapat konsultasi, perwakilan DPD belum bisa menerima rancangan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan MPR itu, tapi juga tidak menolak," katanya.

Pimpinan Sementara MPR Marzuki Alie menjelaskan bahwa hasil rapat konsultasi memang tidak menetapkan komposisi wakil DPD dalam pimpinan MPR. "Komposisi tidak ditentukan, tapi berdasarkan lobi-lobi politik," katanya. (Budi Sucahyo, sw)

Ganjar Pranowo: "Taufik Kiemas Telah Disiapkan Sejak Lama."

Jurnal MPR (04/10). Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di MPR tetap memperjuangkan Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR periode 2009-2014. Nama Taufik Kiemas sudah beredar sejak lama disebut-sebut sebagai pengganti posisi Hidayat Nur Wahid. Tapi, berkembang nama lain, Ginandjar Kartasasmita (DPD) dan Hidayat Nur Wahid.

Ginandjar menyampaikan hal ini sebelum berlangsungnya pemilihan Pimpinan MPR RI Sabtu (3/10). Menurut Ginandjar, penasihat PDI Perjuangan ini sudah sejak lama dipersiapkan menjadi Ketua MPR. "Sebenarnya mas Taufik sendiri tidak berkeinginan untuk maju. Justru dorongan itu muncul dari beberapa partai secara langsung," katanya.

Ginandjar lalu mengutip tanggapan Taufik Kiemas atas sikap sejumlah partai tersebut: "Bila dorongan itu serius, maka akan tetap maju. Namun, kalau tidak serius, lebih baik mundur."

Berdasarkan hal itu, lanjutnya, pihaknya akan saling menghormati dan saling menghargai atas dukungan partai lain tersebut. "Kalau semuanya berpegang teguh pada komitmen, maka insya Allah akan berhasil," ungkap dia.

PDI Perjuangan punya alasan menjagokan Taufik Kiemas untuk menjadi orang nomor satu di MPR. Pada awalnya, kata Ginandjar, ada dukung dulu lalu menyusul ada panggilan batin dan jiwa, sehingga Taufik Kiemas menyatakan kesediannya.

Taufik, menurutnya, selalu mengatakan bahwa ada pluralisme yang harus dibawa, ada persoalan NKRI, ada persoalan Pancasila yang mulai pelan-pelan tidak tersuarakan yang kemudian menjadi keprihatinan suami Ketua PDI Perjuangan itu.

"Dari situlah, pada titik konsepsi idealita dengan dukungan realita pada kekuatan politik, maka dua yang bersenyawa itu kemudian diambil. Intinya, akan ada agenda bagaimana merajut kembali kemungkinan terjadinya keretakan republik ini, dengan semangat kebhinekaan, dan Pancasila sebagaimana cita-cita pendiri bangsa," katanya.

Ditanya apakah dengan mengambil posisi Ketua MPR ini sebagai langkah awal berkoalisi dengan pemerintah? Ginandjar menepis pandangan tersebut. "Tidak, ini dua hal sangat berbeda. Koalisi soal di Istana, sedangkan Ketua MPR di Senayan," jelas politisi asal Jateng ini.

Ginandjar juga menampik, posisi Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR dimaksudkan untuk mengawal amandemen atau kembali ke UUD 1945. "Kita jauh dari pikiran untuk kembali atau mengubah UUD NRI Tahun 1945, tapi apakah republik yang digawangi konstitusi seperti ini sudah baik atau belum. Kita tidak konservatif, tapi dinamis," ujarnya.

Bahkan Bung Karno sendiri mengatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD sementara yang anak cucu kita akan bisa mengubahnya. Cuma perubahan seperti apa, itu yang harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai perubahan itu kemudian seolah-olah atas nama demokrasi tapi tidak *operatable* atau justru menimbulkan potensi yang lain.

Ginandjar mangajak segenap komponen bangsa untuk mengevaluasi UUD yang sudah diamandemen. Artinya, sudah baik diteruskan, tetapi yang tidak baik diatur lagi dengan lebih teliti dan lebih hati-hati. Lewat UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bisa dipakai untuk mengakomodir bagaimana cara mengamandemen yang benar sehingga tidak bolak-balik konsepnya berubah-ubah.

"Kita pastikan dari sana, nanti ada kepastian bila ingin mengamandemen UUD, ada sisi substansi dan sisi lainnya, bukan bicara tanpa ujung-pangkal," ungkap Ganjar menambahkan. (mp)

Tetty Kadi Kagumi Proses Persidangan

Jurnal MPR (04/10).Siapa yang tak kenal artis lawas era tahun 70-an, Tetty Kadi. Melenggangnya Tetty Kadi masuk sebagai anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat VIII menambah panjang deretan artis yang masuk menjadi anggota Parlemen.

Tetapi jangan disangka Tetty Kadi ini orang baru di panggung politik. Sebelum melangkah ke Senayan, Tetty Kadi sudah pernah menjadi anggota DPRD tingkat I Jawa Barat selama dua periode, alias 10 tahun. Arena itu soal politik, Tetty Kadi sudah terbilang tergolong matang, dan ini terlihat dari bahasa dan komentar-komentarnya yang terlihat menguasai bidangnya, ini sangat berbeda dengan bahasa dan artis yang baru masuk MPR/DPR RI yang biasanya terkesan kagok.

Ketika ditanyakan komentarnya soal keanggotaannya di MPR/DPR RI, wanita yang masih terlihat garis kecantikannya itu langsung berseloroh soal kekagumannya pada proses kinerja sidang sampai pelantikan anggota DPR RI.

"Alhamdullilah, saya dipercaya rakyat masuk ke kancah politik nasional DPR RI. Saya sangat kagum ya... terutama pada saat pelantikan itu sudah langsung bisa dipilih pimpinan DPR RI-nya. Padahal, yang saya lihat dari berbagai propinsi dan Kabupaten kota malah ada yang satu bulan lebih belum juga menentukan pimpinan dewan. Nah, ini rupanya persiapannya sangat matang," katanya.

Lebih jauh Tetty Kadi mengatakan bahwa inilah bukti profesionalitas kinerja MPR RI lalu pada saat menyusun tata tertib anggota majelis, walaupun mungkin nantinya tata tertib itu akan lebih dikaji lagi. "Tetapi, minimal proses kinerja yang lalu sangat baik sehingga berimbas pada proses pelantikan anggota saat ini. Tadinya saya pikir akan berjalan sangat alot tetapi ternyata sangat lancar, nah sekarang tinggal pemilihan Ketua MPR RI."

Mungkin sedikit alot kalau melihat dari proses keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU NO. 27 Th 2009 pasal 14 itu. "Mudah-mudahan sih tidak begitu alot. Menurut saya harus ada keterpaduan antara DPR dan DPD," tandas Tetty.

Ia menambahkan, masalah siapa yang dijagokan sebagai ketua MPR RI, secara kolektif akan memilih sesuai pilihan fraksinya. Ketika Jurnal MPR menyinggung aktifitas menyanyinya, Tetty Kadi menjelaskan hanya kadang-kadang. Kalau ada orang mendaulat dirinya untuk menyanyi, atau ada undangan khusus.

Sebab, dalam waktu dekat, ia akan menuju Singapura dan menyanyi di sana untuk sebuah cara kenegaraan. "Menurut saya itu momen penting karena dengan posisi politis yang saya emban sekarang ini ada undangan, apalagi keluar negeri menjadi ajang sosialisasi saya untuk lebih memperkenalkan Indonesia terutama untuk pengembangan UKM-UKM di Jawa Barat," pungkas Tetty.

Tetty berharap di DPR RI akan berkiprah di Komisi VI yang membidangi kerja Perindustrian,

Perdagangan, Investasi, Koperasi & UKM. Sebab, ia mempunyai pengalaman 10 tahun membidangi itu ketika aktif di Komisi Perekonomian di Jawa Barat. "Saya mempunyai agenda besar yang telah saya jabarkan di Jawa Barat, tinggal penerusan saja di pusat dengan skala nasional," ujar pelantun tembang lawas 'Sepanjang Jalan Kenangan', 'Pulau Seribu', dan 'Teringat Selalu' itu mantap. (Derry Irawan)

Solidaritas untuk Gempa Sumbar

Jurnal MPR [4/10]. Anggota MPR/DPR dari Partai Golkar Nudirman Munir interupsi agar Pimpinan Sidang Paripurna MPR RI Marzkui Alie dan Irman Gusman mempercepat masa persidangan hari Sabtu (3/10) kemarin.

Alasannya, sebagai wakil dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Nudirman belum sempat kembali ke Sumatera Barat sejak bencana itu terjadi pada 30 September silam. Sedangkan masa persidangan berjalan alot dan berlarut-larut. Selain untuk memberi bantuan, ada pula keluarga yang menjadi korban. "Keluarga sudah menunggu," katanya.

Usai menghadiri sidang, Nudirman pun mengadakan konferensi pers di pers room DPR RI. Sebanyak 106 anggota DPR dari Partai Golkar menyumbang untuk korban bencana Sumatera Barat dan Jambi masing-masing Rp 3 juta sehingga total dana yang terkumpul berjumlah 318 juta.

Pada kesempatan sama Nudirman juga mengecam maskapai penerbangan yang menaikkan harga tiket ke Padang hingga berkali lipat. "Kalau bisa jangan mencari untung untuk sekali ini," katanya. Tiket ke Padang bisa mencapai Rp 3 juta sekali jalan. (Iman Firdaus)

Hajriyanto Y. Thohari GOLKAR Tidak Punya Target Jadi Ketua

Jurnal MPR [04/10]. Beberapa waktu menjelang acara pemilihan Pimpinan MPR RI beredar sejumlah nama untuk menduduki posisi Ketua dan Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid (PKS), M. Taufik Kiemas (PDIP), Hajriyanto Y. Thohari (PG), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), dan Lukman Edy (PKB), Ginandjar Kartasasmita (DPD Jawa Barat), dan Wahidin Ismail (DPD Papua Barat).

Hajriyanto Yasin Thohari, anggota MPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV menyatakan bahwa sejak awal Partai Golkar memang tidak mempunyai target untuk terpilih menjadi Ketua MPR, tapi hanya ditugaskan menjadi bagian dari kepemimpinan MPR. Hajriyanto memang calon Pimpinan MPR yang diajukan oleh Partai Golkar.

Lelaki kelahiran Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, 26 Juni 1960, ini pada pemilu legislatif 2009 terpilih kembali menjadi anggota DPR/MPR untuk ke empat kalinya. Pada periode 2004-2009, ia menduduki jabatan Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR, tapi pada periode 2009-2014 menempati posisi Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR.

Sementara di DPR RI pada periode 2004-2009 Hajriyanto ditempatkan di Komisi I membidangi masalah luar negeri, komunikasi dan informasi, serta pertahanan keamanan.

Kepada wartawan *Jurnal MPR* beberapa saat sebelum pemilihan pimpinan MPR, Hajriyanto mengatakan, kalau saja ia terpilih menjadi Wakil Ketua MPR maka program yang akan dijalankan tentunya sesuai dengan yang diatur oleh konstitusi.

"Tugas dan kewenangan MPR sekarang tentunya berbeda dengan MPR sebelum amandemen UUD 1945," kata Hajriyanto.

MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan hanya lembaga Negara yang setara dengan lembaga Negara lainya. Karena itu, MPR sekarang tidak lagi memiliki kewenangan membuat ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur. Tugas utama MPR sekarang adalah mengubah dan menetapkan UUD.

Meskipun demikian, kata Hajriyanto, tentu MPR harus selalu berada pada posisi *standby* terhadap kemungkinan terjadinya krisis konstitusi ataupun krisis kepemimpinan nasional. "Hanya dua hal itu, sehingga praktis target kita adalah tetap mengawal konstitusi, tetap menjaga dasar Negara kita Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Dalam hal mengawal konstitusi agar dapat berjalan sesuai dengan amanah UUD, kata Hajriyanto menambahkan, F-PG akan selalu siap bersama-sama dengan fraksi lain.

Mengomentari berkembangnya komposisi Pimpinan MPR RI pada pra pemilihan dengan skenario 3 DPR + 2 DPD atau 4 DPR + 1 DPD, Hajriyanto menyatakan, dari sudut UU tidak dibenarkan untuk menormakan komposisi tersebut. "Jadi, apakah 4-1, 3-2, atau 2-3 itu tidak dibenarkan," katanya.

Karena kalau itu dinormakan maka menjadi bertentangan dengan konstitusi, dan karena itu komposisi 4-1, 3-2 atau 2-3 itu tergantung sepenuhnya pada proses politik melalui lobi-lobi yang dilakukan. (Tuti)

Lukman Edy : F-PKB Tetap Usung Paket Yang Sama

Jurnal MPR [04/10].Politik memang sangat dinamis, setiap saat bisa berubah. Buktinya, menjelang Pemilihan Pimpinan MPR, Sabtu malam (3/10), posisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang semula menyatakan sepakat bersama koalisi besar mengusung paket yang sama, ternyata kabarnya tak sesuai kenyataannya.

Fraksi PKB, menurut berita yang berkembang di seputar Senayan, Sabtu malam (3/10) justru mengambil posisi yang tak seperti dikatakan oleh Ketua Fraksi PKB MPR, Lukman Edy sebelumnya. Berita itu menyebutkan, Fraksi PKB tidak ikut dalam koalisi besar itu, dan justru, katanya, dipinang oleh Fraksi Kelompok DPD, yang malam itu "memboikot" Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda Pemilihan Pimpinan MPR.

Lukman Edy sebelumnya menyatakan, jika disepakati hanya akan ada 1 (satu) paket Pimpinan MPR RI. "Namun, jika kesepakatan tersebut tak tercapai, tentunya akan ada beberapa paket pimpinan MPR, dimana akan terjadi pertarungan cukup hebat antara Hidayat Nur Wahid, Taufik Kiemas, dan Ginandjar Kartasasmita," katanya.

Jadi, "F-PKB tetap pada komitmen awal yakni mengusung paket yang sama, namun demikian kita tetap melihat hasil forum lobi," tandasnya pria kelahiran Teluk Pinang, 26 November 1970, yang oleh partainya dicalonkan menjadi salah satu Pimpinan MPR.

Untuk bursa calon Ketua MPR Taufik Kiemas dinilai berada di atas angin. Tapi, DPD juga punya jago yang didukung hampir seluruh anggota

DPD. Dia adalah Ginandjar Kartasasmita. Siapa yang akan terpilih. Hanya, anggota MPR-lah yang menentukan.(nt)

Lukman Hakim Saifuddin MPR Harus Siap Jika Terjadi Amandemen

Jurnal MPR [04/10]. Saat berita ini ditulis, Lukman Hakim Saifuddin disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Pimpinan MPR RI periode 2009-2014. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini pada periode 2004 -2009 menempati posisi sebagai Ketua Fraksi PPP di MPR, dan anggota Komisi III DPR RI membidangi hukum dan HAM.

Lukman kembali berkiprah ke Senayan, setelah meraup suara yang signifikan pada pemilu legislatif 2009 dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI. Kiprah Lukman menjadi seorang politisi tidak diragukan lagi, dia merupakan politisi yang matang.

Kepada Jurnal MPR, Lukman mengatakan, jika terpilih menjadi salah satu Pimpinan MPR RI dia berharap kelembagaan MPR tetap bisa menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, sesuai dengan wewenang dan tugasnya yang sudah diatur dalam konstitusi.

Ke depan, menurut Lukman, perlu diantisipasi wacana yang berkembang di tengah masyarakat, yang menginginkan adanya amandemen UUD ke lima. Dan tampaknya, kata Lukman, peluang untuk mengamandemen UUD tetap terbuka.

"Bagaimanapun MPR harus siap kalau pada periode lima tahun ke depan terjadi amandemen UUD NRI Tahun 1945. Kalau memang menjadi tuntutan mayoritas bangsa, Pimpinan MPR dan seluruh anggotanya tak bisa mengelak dari kewajiban itu," jelasnya.

Ketika ditanyakan, apakah partainya akan kembali mengusulkan masuknya rumusan perubahan pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, yaitu.... kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? "Tidak ada pemikiran ke arah sana," tegas tokoh muda PPP ini.

Lukman mengatakan, jika ada amandemen ke lima UUD, hal yang akan dibahas nantinya adalah soal materi yang menjadi usulan, seperti eksistensi DPD, lalu hubungan Presiden dengan DPR dalam proses legislasi, juga keberadaan Perpu. "Hal-hal seperti itu bisa menjadi tema materi amandemen ke lima UUD NRI Tahun 1945," tambahnya.(Tuti/mp)

Suasana Pelantikan Anggota DPR/MPR 2009 Kurang Greget?

Jurnal MPR [04/10]. Rangkaian acara pelantikan anggota MPR periode 2009-2014, diakui oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR Ganjar Pranowo, kurang greget. Kurang meriah dibanting dibanding pelantikan anggota MPR tahun 2004.

Juga, kalau dilihat dari sisi peliputan, pada lima tahun lalu sebagian besar stasiun TV seakan berlomba menyiarkan secara langsung. Namun kali ini praktis hanya TVRI dan tv intern DPR yang menyiarkan secara langsung.

Begitu pula pameran foto, hanya beberapa saja yang dipajang. Stan pameran dari instansi lain tidak nampak, sementara kios-kios sejumlah produk industri nasional tidak ada lagi. Dalam acara ini hanya terdapat kios yang menjajakan berbagai cenderamata MPR, DPR dan DPD yang dikelola Dharma Wanita Setjen DPR, kios produk kopi, BNI dan Telkom.

Kurang gregetnya rangkaian acara pelantikan anggota MPR 2009 ini bisa saja disebabkan karena terjadinya musibah gempa dahsyat yang menimpa Sumatera Barat, tepat sehari sebelum acara pelantikan. Di sisi lain, ketidakhadiran Presiden dalam acara sakral ketatanegaraan lima tahunan ini bisa jadi menjadi salah satu penyebabnya.

Faktor lain adalah isu-isu yang berkembang dalam rangkaian acara pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR masa bakti sekarang ini terasa monoton. Contohnya, pengambilan keputusan dalam penetapan Pimpinan DPR praktis tidak ada hambatan, keputusan diambil secara aklamasi, mulus tanpa halangan apapun.

Yang dirasakan agak alot hanya pemilihan Pimpinan MPR, mengakibatkan pemilihan dan pelantikan tertunda dari jadwal yang disusun sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR Ganjar Pranowo mengatakan pelantikan anggota DPR/MPR seharusnya dijadikan sebagai hal yang biasa saja. Tidak perlu ada greget, yang penting cepat selesai lebih baik kemudian segera bekerja. Termasuk soal pilih memilih pimpinan

Mantan Ketua Pansus RUU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ini menyatakan, konsensus sebelumnya tidak perlu pilih memilih, diajukan secara paket lalu diputuskan secara mufakat. Seperti pemilihan Pimpinan DPR bisa dilakukan dengan cepat dan mulus, serta elegan .

"Tidak perlu greget-gregetlah, pimpinan MPR terpilih cepat dan segera bekerja. Ini seremonial, publik mengetahui ini biayanya banyak. Berdebat bertele-tele, kita ini nggak enak hati. Pikiran kita terganggu seharusnya kita cepat bergerak responsif terhadap persoalan yang menimpa bangsa ini termasuk bencana gempa," katanya. (mp)

Rapat Paripurna II MPR RI Menetapkan Pimpinan Fraksi

Jurnal MPR [04/10]. Rapat Paripurna MPR RI II dengan agenda Pengesahan Rancangan Acara Sidang, Pembentukan Fraksi/ Kelompok Anggota, serta Pengesahan Tatacara Pemilihan Pimpinan MPR, berlangsung di Sabtu (03/10) di Gedung Nusantara.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua MPR sementara Marzuki Alie (Ketua DPR RI) didampingi Irman Gusman (Ketua DPD RI) itu mempersilah semua fraksi secara berturut-turut mengusulkan nama fraksi dan susunan pimpinan fraksi di MPR RI.

Dimulai oleh Fraksi Partai Demokrat yang menetapkan Agus Hermanto serbagai Ketua Fraksi dan Adiyaman Amir Saputra sebagai Sekretaris Fraksi. Dilanjutkan Partai Golkar, menetapkan Hajriyanto Y Tohari menjadi Ketua Fraksi didampingi Agun Gunanjar sebagai sekretaris.

Lalu, diteruskan Fraksi PDI Perjuangan yang menetapkan Panda Nababan sebagai Ketua Fraksi dan Ganjar Pranowo sebagai sekretaris. Fraksi PKS menetapkan Soemandjaja sebagai Ketua Fraksi didampingi sekretaris Zulkifliemansyahs.

Selanjutnya, Fraksi PAN menetapkan Ibrahim Sakty Batubara sebagai Ketua Fraksi dan Mardiana Indraswati sebagai sekretaris. Fraksi PPP menetapkan, Ketua Fraksi Irgan Chairul Mahfiz didampingi sekretaris, Zainut Tauhid Sa'adi.

Sedangkan Fraksi PKB menetapkan M. Lukman Edy sebagai Ketua Fraksi didampingi A. Kadir Karding sebagai sekretaris.

Sementara partai pendatang baru Gerindra menetapkan Martin Hutabarat pada posisi Ketua Fraksi, dan Sumaryati Arijoso sebagai sekretaris. Sedangkan Hanura menetapkan Sumintarsi Muntoro sebagai Ketua Fraksi dan Susanintyas Nefo Handayani Kertapati sebagai sekretaris.

Usai penyampaian usulan, Ketua MPR sementara Marzuki Alie menjelaskan, khusus untuk unsur pimpinan Fraksi Partai Golkar masih bersifat sementara, menunggu hasil Munas Partai Golkar di Pakanbaru, Riau, 5-8 November 2009.(bs, huda)

Achmad Farhan Hamid "Yang Diputuskan MK Lebih dari yang Diminta."

Jurnal MPR (04/10). Ketika DPR RI Periode 2004-2009 memutuskan sahnya RUU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi undang-undang. Lima anggota DPD, Intsiawati Ayus (Riau), Marhany Victor Poly Pua (Sulawesi Utara), Sofyan Yahya (Jawa Barat), Sri Kadarwati (Kalimatan Barat), dan Wahidin Ismail (Papua Barat), mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka tidak terima dengan pasal 14 ayat 1 dalam undang-undang itu yang menyebutkan "Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR". Memang pasal itu dinilai oleh banyak kalangan tidak adil.

Wakil Ketua DPD 2004-2009 dan Periode 2009-2014, La Ode Ida, sebelum judicial review itu diputuskan, mengatakan adanya pasal yang menyatakan bahwa Ketua MPR dari unsur DPR, secara mendasar masyarakat awam pun tahu ini merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, terkait hak-hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih.

Padahal konstitusi memandatkan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD sehingga untuk Ketua MPR seharusnya anggota dari dua lembaga itu sama-sama mempunyai hak, tidak boleh ada diskriminasi dalam hak untuk menjadi Ketua MPR.

Angota DPD 2004-2009 dan 2009-2014, Bambang Soeroso, sebelum *judicial review* diputuskan juga menyebut, hak memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR adalah hak setiap anggota DPR dan DPD. Hal itu harus dibuka selebar-lebarnya. Salah satu cara untuk memilih Ketua MPR adalah diadakan pemilihan secara langsung dalam sebuah forum. Meski jumlah anggota DPR lebih banyak, kalah dan menang kan terjadi saat proses pemilihan. Dalam hal ini mekanisme dan proses demokratisasi harus dijalankan. "Hak kami untuk menjadi Ketua MPR sudah dihilangkan," ujarnya.

Namun ketika *judicial review* sudah diputuskan, anggota DPD juga kebingungan kembali. Alasannya, pemilihan Ketua MPR memang antara anggota DPD dan DPR sama-sama mempunyai hak, namun formasi pimpinan MPR tidak berdasarkan perimbangan. Karena kalah suara, banyak anggota DPD khawatir unsur DPD menjadi pimpinan MPR menjadi jauh lebih kecil dari formasi sebelumnya.

Untuk lebih jauh mengupas masalah itu, Ardi Winangun melakukan wawancara dengan anggota Pansus RUU No. 27 Tahun 2009 yang sekaligus anggota DPR RI Periode 2004-2009 dari Fraksi PAN Achmad Farhan Hamid, yang sekarang menjadi anggota DPD 2009-2014 dari Nangroe Aceh Darussalam. Berikut petikan wawancara itu.

Sepertinya anggota DPD tidak konsisten dengan hasil judicial review?

Bukan tidak konsisten, semuanya berprinsip pada gagasan kesetaraan lembaga, semuanya merasa sadar bahwa kalau secara eksplisit disebutkan angka-angka itu dinormakan pada undang-undang atau tata tertib itu tidak sesuai dengan ruh UUD. Jadi satu-satunya cara sekarang adalah membangun konsensus, dan itu dinilainya sama saja dengan undang-undang atau aturan main. Sekarang yang terpenting bagaimana upaya kita, baik teman di DPD atau DPR, itu tidak merasa lembaganya saling berkompetisi. Ini prinsip dasar yang penting.

Kalau bisa mari kita bangun prinsip yang saling mengisi, saling membutuhkan, kalau hal ini bisa berkembang, pandangan saya kepentingan-kepentingan politik akan terabaikan.

Apakah DPD justru kena batunya setelah hasil judicial review itu?

Ha.. ha.. ha... mungkin terlalu vulgar ya kalau mengatakan demikian. Ada satu hal posistif yang dari *judicial review* yang dilakukan, yakni bahwa mata kita terasa terbuka bersama, bahwa tidak boleh satu lembaga menentukan kepemimpinan di lembaga lain, itu yang paling penting. Jadi kalau istilah kena batunya itu memang arahnya, arah kepentingan kekuasaan. Tapi saya tidak menggunakan istilah itu.

Kalau formasi pimpinan MPR tidak sesuai dengan keinginan, apakah DPD akan melakukan protes selanjutnya?

Saya tidak berandai-andai, hanya yang pasti unsur DPD pasti akan masuk dalam unsur pimpinan MPR. Bagaimana perbandingan kita lihat saja hasil selanjutnya.

Sebetulnya yang diinginkan DPD melalui judicial review itu apa?

Yang diinginkan itu justru membuka ruang untuk dipilih oleh siapa pun menjadi Ketua MPR dengan tetap komposisi 3:2, tetapi yang diputuskan oleh MK kan lebih dari yang diminta, dan ya sudah kita terima.

Berarti malah tidak mengakomodasi DPD?

MK dalam pertimbangannya juga menyebutkan diperlukan membangun konsesus agar ditetapkan dalam tata tertib MPR agar keterwakilan politik dalam hal ini DPR dan keterwakilan daerah dalam hal ini DPD tetap ada dalam kepemimpinan MPR. (AW)

Paranormal Kondang Masuk Senayan

Jurnal MPR (04/10). Diruang makan Nusantara V usai sidang Paripurna II Pelantikan anggota MPR RI, Sabtu (03/10), tepat berdiri disamping Jurnal MPR sosok paranormal kondang yang terkenal dengan iklan komersilnya dengan jargon. "..."kamu lahir senin legi to? kamu tidak cocok kerja di air, cocoknya jadi pedagang...". Sejenak Jurnal MPR memperhatikan lama siapa ini, tak berapa lama baru kemudian ingat, sosok paranormal kondang yang jargon iklannya sangat mudah diingat itu adalah Imam Suroso.

Dia masuk sebagai anggota MPR/DPR RI Fraksi PDIP Dapil Jawa Tengah III. Jurnal MPR menyapa dan dijawab dengan ramah. Ketika ingin meminta pendapatnya, Imam Suroso belum bersedia memberikan komentar. "Nanti saja ya..saya sedang mencari kawan saya..lah itu dia,". Imam Suroso langsung menyongsong rekannya itu. Tak berapa lama Imam Suroso menghampiri Jurnal MPR.

"Mas..mas bisa minta tolong poto saya dengan rekan saya ini, pakai kamera saya saja, tolong ya," kata Imam. Jurnal MPR pun bersedia mengambil gambar mereka. Setelah selesai Imam Surosopun mengucapkan terima kasih. Walah.. walah.. jadi ingat Pak Permadi politisi kritis yang juga paranormal yang sempat memberi warna di kancah parlemen.

Apakah Imam Suroso ini pengganti Permadi? Selamat berkarya di kancah politik mas Imam.. (Derry Irawan)

Akibat Tidak Sabar

Jurnal MPR (04/10). Usai Rapat Paripurna II Sabtu (03/10) kemarin siang, seperti biasa para anggota dewan keluar Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, melewati pintu utama dan langsung turun lift. Tetapi ada tiga orang anggota melihat banyaknya para anggota dewan yang antri untuk turun lift, mengurungkan niatnya untuk turun dengan lift dan langsung berjalan lurus kedepan kearah tangga depan luar gedung Nusantara.

Beberapa orang mencoba memperingati mereka, tetapi mereka tetap cuek saja berjalan. Bisa di tebak mereka langsung berhenti ketika menyadari kekeliruan mereka dan langsung balik arah. "Lewat sana tidak bisa ya," tanya salah seorang anggota dewan itu.

"Ooo..tidak bisa. Di sana tidak boleh dilewati, silahkan anda-anda melewati lift untuk turun, antrinya tidak lama kok..," jelas seorang petugas protokol ramah.

"Oh ya..maaf kami kira bisa langsung lewat sana..ya deh kita lewat lift aja ya," ujar salah seorang dari mereka. "Mari dipersilahkan...," balas petugas santun. Mereka pun pergi dengan terburu-buru. (Derry Irawan)

Salam Baru dari Partai Baru

Jurnal MPR (04/10). Sabtu (3/10) adalah hari ketiga bagi Anggota MPR RI melakukan rapat-rapat di gedung wakil rakyat ini. Pagi itu, para anggota mengikuti Sidang Paripurna II dengan agenda Pengesahan Rancangan Acara Sidang, Pembentukan Fraksi/Kelompok Anggota, serta Pengesahan Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR.

Masing-masing Fraksi bersiap-siap membacakan di depan podium nama-nama Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara fraksinya masing-masing.

Satu per satu fraksi itu maju dimulai dengan fraksi terbesar pemenang Pemilu 2009 yaitu Fraksi Partai Demokrat, dan seterusnya. Lalu tibalah giliran juru bicara partai pendatang baru Fraksi Partai Gerindra maju ke podium.

Sumarjati Arjoso, nama juru bisa Partai Gerindra itu. Setelah membacakan susunan pimpinan fraksinya, anggota MPR/DPR dari dapil Jawa Tengah III mengakhiri kehadirannya di podium itu fraksi dengan mengucapkan: "Salam Indonesia Raya."

Tak ada sambutan dari peserta sidang atas salam yang diberikan oleh juru bicara Gerindra itu, bahkan dari anggota fraksi Gerindra sendiri. Berbeda dengan Fraksi PDI Perjuangan yang selalu dibuka dan ditutup dengan pekikan: "Merdeka," dan disambut pula dengan pekikan Merdeka pula oleh anggota fraksinya dengan penuh semangat.

Mendengar ucapan salam baru yang disampaikan anggota dari Partai Gerindra itu, salah satu yang hadir di balkon Gedung Nusantara berkomentar: "Mungkin itu ucapan salam ciri khas Partai Gerindra," katanya. "Tapi, kok aneh ya rasanya nggak ada nada salam Indonesia Raya," timpal yang lain.

Tapi, temannya yang lain lagi justru menganggap itu sah-sah saja sebagai ciri khasnya. "Justru hal yang tidak lazim itu, lama-lama akan menjadi lazim. Nantinya juga akan familiar," katanya.(Tuti)

Lahan Parkir Itu Segera Dikosongkan

Jurnal MPR (04/10). Berita Presiden SBY akan hadir pada pelantikan Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014 membuat suasana di kompleks MPR/DPR mendadak sibuk. Terutama aparat pengamanan bagian dalam (pamdal), mengumumkan agar lahan parkir di depan Gedung Nusantara dan Gedung Nusantara segera dikosongkan.

Tak terkecuali, baik mobil tamu atau pun mobil milik pejabat dan pegawai MPR/DPR harus disingkirkan dari lahan parkir tersebut. Pihak Pamdal membolehkan hari Sabtu (03/10) itu mobil parkir di sana, karena tidak ada rencana presiden datang.

Namun, begitu menerima kabar Presiden akan hadir pada Sidang Paripurna MPR dengan acara pelantikan Pimpinan MPR pada Sabtu malam (03/10), maka pihak pamdal pun bertindak cepat, membersih mobil dari lahan parkir itu, dan dipindahkan ke tempat lain.

Secara protap, bila ada presiden, wakil presiden, atau tamu dari negara lain setingkat presiden, perdana menteri, wilayah parkir itu harus bersih dari mobil atau kendaraan lainnya. Akhirnya pamdal MPR di setiap lantai memberitahukan ke ruang-ruang agar yang memiliki mobil untuk segera dipindahkan.

Tidak cukup dengan itu, Sutjipto, pamdal yang biasanya menjaga pintu masuk Gedung Nusantara III, berkali-kali melalui pengeras suara mengingatkan agar pemilik mobil yang memarkirkan mobil di depan Gedung Nusantara agar segera memindahkan mobilnya.

"Saya sudah berkali-kali mas mengingatkan pemilik-pemilik mobil yang masih belum dipindahkan," katanya. (Ardy Winangun)

Anak Betawi Jadi Anggota MPR

Jurnal MPR [04/10]. Anak Betawi, mungkin tidak lagi digambarkan seperti dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan. Sinetron yang diperankan sekaligus disutradarai oleh Rano Karno itu, anak Betawi digambarkan sebagai anak kampung yang ingin menjadi kaya, maka orangtuanya menyekolahkan Si Doel hingga perguruan tinggi.

Kini banyak anak Betawi yang sudah sukses. Di berbagai sektor kehidupan, orang-orang Betawi hadir di dalamnya. Diantara orang Betawi yang sukses itu adalah, Nuroji. Ia adalah anggota MPR RI Periode 2009-2014, kelahiran Depok, Jawa Barat. Saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra di Dapil VI Jawa Barat, Bekasi dan Depok, ia menggunakan motto: "Saatnya Putra Daerah Dipilih dan Memimpin. Salam Putra Betawi..!"

Menurut pria alumni IPB itu, di Partai Gerindra ia menemukan 3 orang Betawi yang juga menjadi anggota MPR. "Dari partai lain saya kira juga banyak, cuma orang-orang Betawi tidak berkoar-koar kebetawiannya," ujarnya.

Selepas dilantik menjadi anggota MPR, Nuroji merasa senang sebab bisa mewakili masyarakat Indonesia. Ia berharap dan berkomitmen mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang selama ini, menurutnya, masih belum tercapai terutama kesejahteraan dan keadilan.

"Pastinya juga saya akan memperjuangkan aspirasi orang Betawi, akan kita perjuangkan terutama identitasnya, juga untuk memotivasi agar jangan jadi penonton saja," ucapnya.

Sebagai wakil rakyat, dan latar belakang dunia pertanian, Nuroji bercita-cita ingin masuk dalam komisi yang membidangi masalah pertanian. Industri pertanian dirasa masih kurang berkembang sehingga banyak petani hanya menjual bahan baku pertanian. Hal ini menyebabkan keuntungan yang didapat belum maksimal. Untuk itu industri-industri pertanian di desa-desa yang mengolah hasil pertanian dibuka.

"Petani jangan hanya menjual bahan baku tetapi juga bisa mengolah supaya nilai tambahnya ada," ujarnya. (Ardi Winangun)

Awal yang Berat bagi Jamal Mirdad

Jurnal MPR [04/10]. Diantara puluhan artis yang masuk menjadi anggota MPR RI Periode 2009-2014, salah satunya adalah Jamal Mirdad. Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah, 7 Mei 1960, itu bisa menjadi anggota MPR, setelah pencalegannya dari Partai Gerindra di Dapil Jawa Tengah I, yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang, mampu mengangkat dirinya.

Suami artis senior Lydia Kandou itu mengatakan, keberhasilan dirinya menjadi wakil rakyat ini merupakan buah dari usahanya yang cukup serius dalam menggalang masa.

"Setelah dilantik menjadi anggota MPR, secara manusiawi sangat senang, artinya usaha kita yang kemarin cukup kenceng, membuahkan hasil," ujarnya. Meski senang, menurut Jamal, ini merupakan awal yang sangat berat untuk melaksanakan amanah itu.

"Sebetulnya belum bisa saya bicara senang-senang dan belum bisa saya untuk mengatakan puas karena pekerjaan baru dimulai," katanya.

Sebagai wakil rakyat, Jamal oleh Fraksi Partai Gerindra kemungkinan diberi mandat untuk masuk dalam Komisi X, komisi yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olah-raga, pariwisata, Kesenian, perfilm-an, kebudayaan, dan perpustakaan. "Insya Allah saya akan masuk dalam Komisi X," ujarnya.

Ketika ditanya tentang banyak orang meragukan kemampuan artis sebagai wakil rakyat, ayah dari artis sinetron Nana Mirdad dan Naysila Mirdad itu mengatakan, "Saya pikir tidak masalah, itu perlu dibuktikan nanti." Menurutnya setiap orang mempunyai hak untuk menilai. Ia meminta waktu selama satu tahun pertama untuk membuktikan bahwa para artis mampu. "Bila para artis bisa membuahkan hasil yang sangat luar biasa buat masyarakat dan negara, berarti penilaian mereka salah," ujarnya.

Sebagai keluarga artis, Jamal mengakui, aktifitasnya sebagai wakil rakyat membuat waktu bertemu keluarga menjadi semakin berkurang. Namun hal itu sudah biasa sebab sebelumnya istri dan anak-anaknya sudah mempunyai kesibukan yang sangat luar biasa.

Sebagai orang yang berlatarbelakang artis dan masih mempunyai daya jual, ketika ditanya apakah dirinya masih akan berprofesi sebagaia artis meski sudah menjadi wakil rakyat, pria yang pernah mendendangkan lagu Mariam Soto itu menjawab, "Saya kira semua itu bisa menjadi kemungkinan bila waktunya sangat tepat," Menurutnya, dunia artis itu adalah bagian dari seni dan budaya yang ada. (Ardi Winangun)

Bermacam Salam di Sidang MPR

Jurnal MPR [04/10]. Nampaknya salam pembuka dan penutup di dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi salah satunya hal yang menarik. Ada yang menggunakan salam dengan merujuk kepada aturan agama seperti assalamualikum, shalom, salam sejahtera maupun Oom swasti astu. Demikian juga ketika mengakhiri pidato. Bahkan tidak sedikit yang menambahkannya dengan salam mereka yang khas, seperti 'merdeka' maupun 'salam Indonesia raya'.

Hal ini terlihat dalam rapat paripurna MPR Sabtu (03/10) kemarin. Dalam sidang yang menetapkan fraksi-fraksi di MPR penggunaan salam juga bermacam-macam. Namun rata rata mereka mengucapkan assalamulaikum, salam sejahtera, shalom hingga mengucapkan Oom swastiastu. Namun, dua partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan seperti biasa menambahkannya dengan pekik 'Merdeka'. Sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya ditambahi dengan pengucapakan 'Salam Indonesia Raya'.

Adapun wakil dari Dewan Pemerintah Daerah paling banyak menggunakan salam. Semua salam dari berbagai agama diucapkan oleh wakilnya ketika berpidato. Begitu juga dengan akhir pidato. Soal salam ini ada juga banyak kekeliruan seperti yang dilakukan oleh anggota Partai Hanura. Ia mengatakan hom santi santi om justru akan mulai berbicara. Padahal seharusnya mengucapkan hom swasti astu. Sontak kekeliruan ini

menjadikan para anggota MPR tersenyum. (Nurul Huda)

Lupa Ketok Palu

Jurnal MPR [04/10]. Hujan interupsi ternyata menjadikan ketua MPR sementara Marzuki Alie lupa ketok palu. Padahal dalam tata tertib sidang, persetujuan harus ditutup dengan ketok palu. Sebelum ketok palu sidang masih dianggap terbuka untuk diinterupsi maupun dilanjutkan.

Hal ini terjadi ketika Marzuki memipin sidang paripurna kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemarin (Sabtu, 3.10), ketika sidang memutuskan tentang tata cara Pemilihan Pimpian MPR RI. Memang pembahasan tata cara pemilihan itu berlangsung sangat alot. Walaupun telah ada kesepakatan dalam lobi fraksi maupun anggota DPD.

Kontan saja hal ini menimbulkan interupsi oleh para anggota sidang yang hadir. "Interuspi pak ketua mohon untuk mengetok palu sebagai tanda persetujuan," ucap salah seorang anggota. Marzuki sendiri tampak kebingungan.

"Saya merasa telah mengetok palu. Belum ya?" katanya sambil bicara dengan Irman Gusman di sampingnya. "Belum pak, " jawab Ketua DPD ini dengan tegas. Tidak lama kemudian Marzuki mengetok palu satu kali sehingga usailah pembahasan tentang tata tertib pemilihan calon ketua MPR. (Nurul Huda)

Sibuknya Para Aspri

Jurnal MPR [04/10]. Bukan hanya anggota dewan baru periode 2009-2014 yang sibuk mengikuti jalannya sidang dan rapat-rapat bahkan hingga malam hari. Asisten pribadi (Aspri) atau staf ahli sang anggota dewan juga tak kalah sibuk. Karena ada di antara anggota dewan yang membawa Aspri atau ajudan. Asisten pribadi harus siap setiap saat mendampingi dan melayani keperluan si majikan.

Maka, dalam setiap persidangan, ketika anggota dewan bersidang, sang Aspri menunggu di luar ruang sidang. Bahkan, dalam sidang paripurna, kadang Aspri ikut mengikuti jalannya sidang dari Balkon. Begitu sidang berakhir, Aspri segera mencari "majikannya". Sambil berbicara di telepon genggam. "Bapak di mana?" atau "Ibu di mana?"

Bergegas mereka mencari "majikan"-nya di antara kerumunan anggota dewan yang baru keluar dari ruang sidang paripurna. Begitu melihat "majikannya", si Aspri pun mendekati dan berbincang sebentar. Setelah itu, anggota dewan kembali sibuk berbincang dengan rekan-rekannya. Sedangkan, si Aspri memantau dari kejauhan. Bukan hanya anggota dewan yang sibuk, Aspri atau staf ahli pun dibikin repot.

Setiap anggota dewan (DDR dan DPD) berhak mendapat seorang staf ahli dan sekretaris yang disiapkan pemerintah. (Budi Sucahyo)

Isteri Jadi Jubir, Suami Interupsi

Jurnal MPR [04/10]. Susahnya jika suami istri aktif dalam satu majelis. Sebab, bisa saja di rumah akur tapi saat di ruang kerja bisa beda pandangan dan hal ini terutarakan di depan anggota lainnya. Ada bebetapa anggota majelis yang suaminya jadi anggota DPR dan istrinya anggota DPD. Misalnya, Marzuki Alie, ketua DPR dan Asmawi anggota DPD asal Sumsel.

Ada juga yang kedua-duanya anggota DPR. Misalnya, Ahmad Dimyati Natakusuma dan istrinya, Irna Narulita. Keduanya dari Partai Pesatuan Pembangunan. Keduanya ternyata tidak kompak di luar.

Ketika Irna Narulita menyampaikan pandangan fraksinya di podium, Sabtu (3/10), sang suami malah mengajukan interupsi. Irna diberi tugas membacakan susunan fraksi PPP di MPR.

Tak lama setelah Irna turun, Achmad Dimyati Natakusumah (PPP) langsung mengajukan interupsi. Dimyati mempersoalkan beberapa peraturan sidang. Tapi, interupsinya tidak mendapat tanggapan. Dimyati, sebelum masuk Senayan adalah Bupati Pandeglang, Banten. (Iman Firdaus)

Membangun Trans Jawa Selatan

Jurnal MPR [04/10]. Dengan terpilihnya Heri Achmadi sebagai anggota MPR RI Periode 2009-2014, berarti pria kelahiran Desa Bangusari, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, itu sudah tiga periode menjadi anggota MPR. Pertama kalinya menjadi anggota MPR, pada periode 1999-2004.

Ia bisa sampai tiga kali menjadi anggota MPR, karena daerah pemilihannya selalu berada di Dapil VII Jawa Timur, yang meliputi, Kabupaten Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Di Ponorogo khususnya, di situlah leluhur berada dan masa kecilnya pernah dihabiskan.

Sebagai wakil dari daerah yang berada di Jawa Timur bagian selatan, Heri Achmadi mempunyai keinginan agar rencana jalan trans Jawa bagian selatan bisa direalisasikan. Trans Jawa bagian selatan itu merupakan jalan negara yang akan menghubungkan kabupaten-kabupaten yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dari Jogjakarta sampai Banyuwangi. Dengan jalan itu maka transportasi dari Jogjakarta hingga Jawa Timur bagian timur menjadi lebih efisein dan cepat.

Heri Achmadi mempunyai keinginan agar proyek itu bisa berjalan sebab dua daerah di dapilnya, yakni Pacitan dan Trenggalek, masuk dalam peta trans Jawa bagian Selatan. Dengan adanya pembangunan jalan itu maka roda perekonomian akan bergerak lebih cepat, sebab daerah-daerah di Jawa Timur bagian selatan banyak yang masih terisolasi. Terisolasi karena berada pada daerah pegunungan dan langsung berhadapan dengan Samudera Indonesia. "Saya mempunyai keinginan dan berjuang agar trans Jawa bagian selatan itu bisa terwujud," ujarnya.

Bagi orang PDIP dan Muhammadiyah, Heri Achmadi bukan orang yang baru. Di partai berlambang banteng dengan moncong putih itu, ia sudah lama berkecimpung. Sedang di Muhammadiyah, selain keluarganya berdarah Muhammadiyah, ia juga disebut pernah aktif di IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah) Ponorogo. Lingkungannya di Kota Reog, adalah basis Muhammadiyah. Saat ini dirinya tercatat sebagai anggota Majelis Hikmah PP. Muhammadiyah.

Pria yang di DPR berada pada Komisi X ini dulunya adalah mantan Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Banyak torehan sejarah perjuangan kemahasiswaanya selama ia kuliah di Kampus Ganesa itu. (Ardi Winangun)

Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati
Anggota MPR dari Fraksi Partai Hanura

Nggak Enak Salah Ucapin Salam

Jurnal MPR (04/10). Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati merasa keki karena telah salah mengucap salam. Pada awal pidatonya saat membacakan Susunan Kepengurusan Fraksi Partai Hanura di MPR periode 2009-2014, ia mengucapkan "Om Santi Santi Om" buat anggota dewan yang beragama Hindu dan Budha. Padahal seharusnya "Om Swasti Astu".

"Saya jadi nggak enak juga. Tapi tadi saya sempet mengucapkan maaf atas kesalahan itu,"ungkapnya saat ditemui seusai Sidang Paripurna MPR ke-2 di Gedung Nusantara, MPR/DPR, Jakarta, Sabtu (3/10).

Nuning, panggilannya, anggota MPR RI dari daerah pemilihan (dapil) IV Jawa Tengah ini bermaksud memberi salam kepada rekan-rekannya yang beragama Hindu dan Budha. Seperti halnya "Assalamualaikum" untuk rekan-rekanya yang beragama Islam atau "Tuhan Memberkati" bagi anggota dewan yang Bergama Kristen/Katholik.

"Pengucapan salam seperti itu kan sebenarnya suatu hal yang lumrah dalam setiap pidato. Seperti memberi salam. Sebetulnya tadi cukup dengan salam sejahtera, semua sudah terwakili," ujarnya.

Saat Nuning tahu salah ucap, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu langsung meralatnya. Ia tidak nampak grogi atau salah tingkah karena sudah merasa familiar dengan para anggota dewan lainnya.

"Karena sebagian besar atau hampir 50% dari anggota yang ada itu teman-teman saya. Dan saya kenal semua. Jadi paling *nggak*, ini sudah seperti keluarga sendiri," lanjut dia.

Diantara 560 anggota DPR terpilih periode 2009-2014, Nuning termasuk salah satu yang beruntung. Hanya dengan bermodal 6.005 suara, ia lolos masuk Senayan. Bahkan, saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan penghitungan suara dan penetapan kursi anggota legislatif terpilih tahap ketiga, Senin (24/8) lalu, kursi Nuning sempat dialihkan ke Abdul Malik Haraman dari Partai Kebangkita Bangsa (PKB).

Dalam kesempatan itu, Nuning juga menyampaikan bela sungkawa atas tragedi gempa di Padang, Sumatera Barat. "Saya bilang Indonesia sedang menangis. Paling tidak kita sebagai wakil rakyat harus peduli dengan rakyat yang kita wakili. Bukan hanya dengan duduk-duduk saja tetapi kita juga harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," demikian Nuning. (Rini S. Danudjaja)